

Salah Alamat Minta Pertanggungjawaban PM Thailand

Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni menyatakan, tidak sependapat dengan pandangan Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang akan meminta pertanggungjawaban Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, soal bencana Montara yang mengakibatkan Laut Timor tercemar.

"Pak Menteri (Menhub Freddy Numberi) salah alamat jika meminta pertanggungjawaban PM Thailand soal bencana Montara di Laut Timor, karena yang bertanggung jawab atas salah satu musibah terbesar di abad ini adalah PM Australia Julia Giliard, bukan PM Thailand," kata Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) kepada pers di Kupang, Minggu, (11/9).

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi kepada pers di Jakarta, Jumat (9/9), mengharapkan PM Thailand yang baru Yingluck yang akan berkunjung ke Indonesia, Senin (12/9), dapat membantu penyelesaian persoalan pencemaran minyak di Laut Timor, akibat meledaknya sumur Montara di Australia Barat pada 21 Agustus 2009.

"Jika PM Yingluck tidak membantu menyelesaikan persoalan ini maka izin operasi PTT Exploration and Production (PTTEP) di Indonesia akan dicabut," kata Numberi yang juga Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Timnas PKDTML), mengancam.

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia itu, mengatakan pemerintah Thailand merupakan pemegang saham di PTT Exploration and Production (PTTEP), namun pihak yang menyebabkan terjadinya pencemaran di Laut Timor adalah PTTEP Australasia yang secara otonom berada di Perth, Australia Barat, dan beroperasi di bawah lisensi Australia.

"Karena itu, yang harus bertanggung jawab dalam masalah ini adalah Pemerintah Australia, bukan pemerintah Thailand. Australia juga harus bertanggung jawab atas penyemprotan ratusan ribu bahkan jutaan liter bubuk kimia sangat beracun yakni `Dispersant Corexit 9500` dan `9572 A`," kata Tanoni, menegaskan.

Penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta", itu menyayangkan pernyataan Menteri Freddy Numberi yang mengancam akan mencabut izin operasi PTTEP di Indonesia.

"Ini sebuah pernyataan yang sangat memalukan, karena yang bersalah dalam pencemaran ini adalah PTTEP di Australia bukan PTTEP yang beroperasi di Indonesia, sehingga salah alamat pula jika harus meminta pertanggungjawaban dari PM Thailand," ucapnya.

Tanoni juga menyayangkan pernyataan Ketua Tim Advokasi penyelesaian Pencemaran Laut Timor Masnelyarti Hilman yang menyatakan, terhambatnya penandatanganan MoU penyelesaian masalah pencemaran ini karena terbentur dengan pergantian Menteri ESDM Australia Martin Ferguson.

Namun, tambahnya, dua hari kemudian pernyataan tersebut diralat oleh Menteri Perhubungan Ferddy Numberi yang mengatakan pergantian Menteri ESDM itu bukan di Australia tetapi di Thailand.

Tanoni mengatakan pencemaran minyak di Laut Timor itu sangat dirasakan dampaknya oleh para petani rumput laut dan nelayan serta masyarakat yang bermukim di sepanjang pantai Pulau Timor bagian barat NTT, Rote, Alor, Sabu dan Sumba, karena disertai pula dengan penyemprotan bubuk kimia beracun Dispersant Corexit 9500 dan 9572 A untuk menenggelamkan tumpahan minyak ke dasar Laut Timor oleh Otorita Keselamatan Maritim Australia (AMSA).

"Hasil tangkapan para nelayan berkurang hingga 80 persen, budi daya rumput laut juga gagal total akibat wilayah perairan budi daya sudah tercemar minyak, 64.000 hektare terumbu karang di Laut Sawu rusak, ikan, lobster atau udang karang dan karapu semakin sulit ditemukan.